

Laporan Hasil Audit Umum

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK KANTOR PUSAT

Distribusi Laporan Hasil Audit:

- ☐ **Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok**
- ☐ **Para SVP dan VP**
- ☐ Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok c.q Komite Audit
- ☐ Para Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok
- ☐ Arsip

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Perihal : Laporan Hasil Audit Umum PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Kantor Pusat

Kami telah melakukan audit umum PT PTP Kantor Pusat untuk periode 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021. Proses audit tersebut dilaksanakan dari tanggal 12 April sampai dengan tanggal 19 Mei 2021, dengan hasil audit sebagaimana kami sajikan pada laporan ini.

Tujuan audit, ruang lingkup audit dan prosedur audit yang telah dilakukan kami rangkum dalam Ringkasan Eksekutif dari laporan ini.

Seluruh hasil audit dan rekomendasi telah kami bahas dan disepakati oleh auditi dan *Person In Charge* (PIC) terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh *Senior Vice President* (SVP) dan *Vice President* (VP) PT PTP Kantor Pusat PTP beserta staf atas kerjasamanya selama pelaksanaan audit.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,



E. Setyo Budi Nugroho

SVP Satuan Pengawasan Internal

	Hal
□ Daftar Isi	3
□ Ringkasan Eksekutif	4
□ Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit	5
1. Penetapan Output yang Diharapkan dari RKM Divisi Treasury Kurang Tepat.....	5
2. Belum Tercapainya Target ACP Sebesar 48 hari.....	5
3. Belum Optimalnya Upaya Penurunan Beban KSMU.....	6
4. Pentingnya SIA dan SIO dalam Kegiatan Operasional Sesuai dengan Pedoman K3.....	7
5. RKM Divisi Teknik yang Belum Terealisasi	7
6. Belum Adanya Progres Beberapa RKM Divisi SDM dan Umum.....	8
7. Laporan Komposisi Personil Belum Sesuai Kondisi Sebenarnya.....	8
8. Belum Adanya Personil Organik yang Bertanggung Jawab Atas Peralatan IT dan Aplikasi yang Berada di Cabang PT PTP.....	9
9. RKM Divisi Pengembangan Usaha yang Outputnya Berpotensi Tidak Maksimal.....	10
□ Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	11
1. Tagihan Pembayaran Pekerjaan dari Para Mitra Masih Ada yang Belum Dibayarkan.....	11
2. Penyusunan Pedoman Harga Pokok Penjualan (HPP) di 9 Cabang.....	11
3. Penyesuaian Tarif OPP/OPT Curah Kering di Cabang Bengkulu.....	11
□ Lampiran:	
1. Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit	12 - 32
2. Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	33
3. Definisi Istilah	34
4. Copy Surat Perintah Audit	35

Tujuan Audit

1. Memberikan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip pokok pengendalian internal terhadap pengelolaan seluruh Divisi di Kantor Pusat PT PTP yang mencakup pengelolaan aspek-aspek finansial/komersial, operasional dan legal/ governance.
2. Memberikan penilaian atas pelaksanaan SOP perusahaan untuk meyakinkan bahwa SOP telah menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan SOP yang ada telah memadai.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan atas kebijakan pengelolaan seluruh Divisi pada Kantor Pusat PT PTP yang mencakup aspek Tata kelola (Governance), Manajemen Risiko (Risk), dan Pengendalian internal (Control).

Ringkasan Prosedur Audit yang Dilakukan

Audit kami laksanakan melalui prosedur berikut:

1. Melakukan reviu atas dokumen/administrasi perusahaan, melaksanakan observasi visual, melakukan wawancara/konfirmasi serta pemeriksaan fisik untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perusahaan
2. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap upaya yang dilakukan manajemen Divisi-divisi di Kantor Pusat dalam pencapaian sasaran/ target perusahaan
3. Melakukan telaah atas aturan, pedoman dan SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Divisi-divisi di Kantor Pusat untuk dilakukan penyempurnaan

Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit :

- Ruang lingkup audit adalah seluruh aktivitas pengelolaan PT PTP Kantor Pusat yang meliputi pengelolaan aspek-aspek finansial, komersial, operasional dan legal/ governance

Periode yang diaudit :

- Periode yang diaudit adalah tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021

Opini Audit

Berdasarkan audit ini kami memberikan opini terhadap Pengelolaan Divisi-divisi di Kantor Pusat PT PTP adalah :

2 – Some Improvement Needed (Diperlukan beberapa perbaikan)

Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

5

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas																																																									
1.	<p>Penetapan Output yang Diharapkan dari RKM Divisi Treasury Kurang Tepat</p> <p>Pada RKM Divisi Treasury, program “Penyelesaian Piutang Macet” telah ditetapkan outputnya: “Saldo Piutang diatas 2 tahun periode 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2020 turun 20% dan Average Collection Period (ACP) sebesar 48 hari.</p> <p>Output tersebut tidak sesuai dengan Daftar Aging Piutang Usaha yang selama ini dilaporkan secara rutin pada Radir Bulanan karena tidak terdapat klasifikasi umur piutang diatas 2 tahun.</p> <p>Akibatnya progres RKM tidak dapat langsung diketahui pada saat pelaporan, sehingga monitoring progress RKM kurang efektif dan data laporan tidak akurat.</p>	<p>a. Menambahkan klasifikasi umur piutang “lebih dari 2 tahun” pada Laporan Aging Piutang yang disampaikan pada Rapat Direksi bulanan atau mengubah output program Penyelesaian Piutang Macet agar sesuai dengan klasifikasi dalam Daftar Aging piutang</p> <p>b. Melaksanakan kontrol pengendalian yang lebih optimal dalam penerbitan laporan perusahaan</p>	<p>VP Treasury</p> <p>31 Agustus 2021</p>	1																																																									
2	<p>Belum tercapainya target ACP sebesar 48 hari</p> <p>Realisasi ACP s.d 31 Maret 2021 adalah sebesar 55 hari, lebih lambat dari target sebesar 48 hari. Dengan gambaran kondisi sebagai berikut:</p> <p>(dalam milyar rupiah)</p> <table><tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">URAIAN</th><th rowspan="2">JML</th><th rowspan="2">KATEGORI</th><th colspan="3">PENYELESAIAN</th></tr><tr><th>BESAR</th><th>SULIT</th><th>JML</th></tr><tr><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2">Nota-nota Manual</td><td rowspan="2">34,81</td><td>Berkas lengkap</td><td>6,05</td><td>-</td><td>6,05</td></tr><tr><td>Berkas tidak lengkap</td><td>-</td><td>28,76</td><td>28,76</td></tr><tr><td>2</td><td>Nota normal</td><td>27,01</td><td>Nota dari Simkeu</td><td>27,01</td><td>-</td><td>27,01</td></tr><tr><td rowspan="3">3</td><td rowspan="3">Nota 'Sampah'</td><td rowspan="3">28,33</td><td>Credit Memo (koreksi nota)</td><td>-</td><td>3,18</td><td>3,18</td></tr><tr><td>Double Line (tercatat > satu kali)</td><td>-</td><td>0,26</td><td>0,26</td></tr><tr><td>Nota Afiliasi (ICT)</td><td>-</td><td>24,89</td><td>24,89</td></tr><tr><td>4</td><td>Dampak Faktur Pajak</td><td>18,19</td><td>Faktur Pajak belum diterima</td><td>18,19</td><td>-</td><td>18,19</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>108,34</td><td>Jumlah</td><td>51,25</td><td>57,09</td><td>108,34</td></tr></table> <p>Penyebab kondisi tersebut antara lain: belum seragamnya penerapan dan besaran UPER dan <i>Term of Payment</i> serta klausul penundaan pelayanan sebelum menyelesaikan kewajiban, serta belum adanya penyelesaian atas piutang tidak lancar baik dengan penghapusan maupun penagihan kepada Debitur.</p>	NO	URAIAN	JML	KATEGORI	PENYELESAIAN			BESAR	SULIT	JML	1	Nota-nota Manual	34,81	Berkas lengkap	6,05	-	6,05	Berkas tidak lengkap	-	28,76	28,76	2	Nota normal	27,01	Nota dari Simkeu	27,01	-	27,01	3	Nota 'Sampah'	28,33	Credit Memo (koreksi nota)	-	3,18	3,18	Double Line (tercatat > satu kali)	-	0,26	0,26	Nota Afiliasi (ICT)	-	24,89	24,89	4	Dampak Faktur Pajak	18,19	Faktur Pajak belum diterima	18,19	-	18,19		Jumlah	108,34	Jumlah	51,25	57,09	108,34	<p>a. Mengajukan kepada Direksi aturan/ketentuan terkait penye-ragaman penerapan dan besaran UPER serta <i>Term of Payment</i> di cabang-cabang.</p> <p>b. Menerapkan secara konsiten SLA kepada Mitra khususnya klausul penundaan pelayanan sebelum menyelesaikan kewajiban</p> <p>c. Melaksanakan penyelesaian atas Piutang Tidak Lancar baik dengan melakukan penghapusan untuk Piutang yang kemung-kinan tertagihnya kecil serta penagihan kepada Debitur yang kemungkinan tertagihnya besar.</p>	<p>VP Treasury</p> <p>31 Agustus 2021</p>	1
NO	URAIAN					JML	KATEGORI	PENYELESAIAN																																																					
		BESAR	SULIT	JML																																																									
1	Nota-nota Manual	34,81	Berkas lengkap	6,05	-	6,05																																																							
			Berkas tidak lengkap	-	28,76	28,76																																																							
2	Nota normal	27,01	Nota dari Simkeu	27,01	-	27,01																																																							
3	Nota 'Sampah'	28,33	Credit Memo (koreksi nota)	-	3,18	3,18																																																							
			Double Line (tercatat > satu kali)	-	0,26	0,26																																																							
			Nota Afiliasi (ICT)	-	24,89	24,89																																																							
4	Dampak Faktur Pajak	18,19	Faktur Pajak belum diterima	18,19	-	18,19																																																							
	Jumlah	108,34	Jumlah	51,25	57,09	108,34																																																							

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
3.	<p>Belum optimalnya upaya penurunan beban KSMU</p> <p>Berdasarkan profil komponen biaya (<i>cost structure</i>) Triwulan I Tahun 2021, proporsi Biaya KSMU sebesar 48,14% adalah komponen biaya terbesar dari total biaya perusahaan. Komposisi terbesar dari Biaya KSMU adalah Biaya KSMU Terminal yang mencapai 51,93% dari total Biaya KSMU.</p> <p>Dalam upaya menurunkan komposisi Biaya KSMU, perusahaan telah melakukan berbagai upaya melalui RKM terkait, namun demikian progress dari RKM tersebut belum sesuai target sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembangunan <i>System Cost Accounting</i> baru tercapai 12% padahal target selesai adalah Desember 2021 Hal itu berdampak pada RKM Penyusunan Pola Komersial dengan output data tarif produk, <i>market share</i>, <i>clusterisasi/grading</i> terminal (dari sisi komersial) dengan realisasi 16,20%. Kondisi di atas berpotensi menghambat program <i>improvement</i> pola operasi/<i>operation maturity level</i>, Rendahnya progress RKM diperparah oleh capaian turunan RKM ke Cabang Priok Triwulan I 2021, dimana 6 dari 10 RKM capaiannya masih 0% sehingga Cabang Priok tidak optimal dalam memberikan support terhadap pencapaian RKM. Di sisi lain, penurunan Biaya KSMU sulit dicapai mengingat porsi <i>market share</i> Cabang Priok sampai Triwulan I 2021 hanya sebesar 2%, terkecil dibanding Cabang-cabang lain dan sangat jauh dibandingkan proporsi ideal <i>market share</i> yakni sebesar 60%-70% 	<ol style="list-style-type: none"> Mempercepat pembangunan <i>System Cost Accounting</i> dengan melakukan koordinasi yang optimal baik dengan pihak internal maupun dengan eksternal Membuat turunan Project Charter Divisi-divisi (Operasi, Komersial dan Treasury) ke Cabang Tanjung Priok Mengoptimalkan fungsi <i>marketing</i> di Divisi Komersial dan Cabang Tanjung Priok untuk meningkatkan pangsa pasar di Cabang Tanjung Priok 	<p>VP Keuangan 31 Agustus 2021</p> <p>VP Operasi, VP Komersial, VP Treasury 31 Juli 2021</p> <p>VP Komersial, GM Tanjung Priok 31 Desember 2021</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>2</p>

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
4.	<p>Pentingnya SIA dan SIO dalam kegiatan operasional sesuai dengan pedoman K3.</p> <p>Masih terdapat SIA dan SIO yang masih belum selesai proses pengurusannya sehingga perlu segera diurus untuk mendukung kegiatan operasional dan penerapan K3 sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Segera melaksanakan inventarisasi alat-alat di seluruh cabang cabang PT PTP. b. Segera mengurus Surat Ijin Alat (SIA) yang sudah expired di wilayah kerja PT PTP. c. Membuat surat kepada PT TPK untuk melakukan pengurusan SIA terhadap alat-alat mekanis Ex PT MTI yang diserahkan ke PT PTP dan dioperasikan oleh PT TPK. d. Segera mengurus SIO yang sudah berakhir masa berlakunya atau yang belum memiliki SIO. 	<p>VP Teknik, VP SDM & Keu 31 Agustus 2021</p>	1
5.	<p>RKM Divisi Teknik yang belum terealisasi.</p> <p>Masih terdapat 10 (sepuluh) program yang belum mendapatkan progress pekerjaan dikarenakan menunggu proses persetujuan RKAP Tahun 2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Segera berkoordinasi dengan divisi terkait terutama bagian pengadaan. b. Mengajukan surat ke Direksi agar segera mendapat persetujuan revisi RKAP investasi tahun 2021. 	<p>VP Teknik, 31 Agustus 2021</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

8

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
6.	<p>Belum Adanya Progres beberapa RKM Divisi SDM dan Umum</p> <p>Pada divisi SDM & Umum terdapat 34 RKM (SDM 16 RKM, ADM. UMUM & RUMAH TANGGA 16 RKM dan Pengadaan 2 RKM).</p> <p>Telaah lebih lanjut dari data tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Dari 11 RKM (Triwulan I) pada Sub Divisi SDM, 6 RKM belum ada progresnya (masih 0%) padahal RKM tersebut tertulis dimulai pada bulan Januari 2021. Dari 2 RKM (Triwulan I) pada Sub Divisi Pengadaan, 1 RKM belum ada progresnya (masih 0%) padahal RKM tersebut tertulis dimulai pada bulan Januari 2021. 	<p>Melakukan pengawasan terhadap progress pencapaian RKM.</p>	<p>VP SDM & UMUM 31 Agustus 2021</p>	2
7.	<p>Laporan Komposisi Personil Belum Sesuai Kondisi Sebenarnya</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah Pekerja Non Organik/Kontrak Penyampaian laporan jumlah personil Realisasi Triwulan II/2020 (693) seharusnya diseragamkan dengan penyampaian laporan jumlah personil Realisasi Triwulan I, III IV tahun 2020 dan Triwulan I tahun 2021 yaitu pada laporan Triwulan II tahun 2020 seharusnya dijumlahkan juga PKWT ($693 + 8 = 701$). Berdasarkan Jenis Pekerjaan Realisasi Triwulan I, II Tahun 2020 dan Triwulan I tahun 2021 tidak masukkan Jumlah pekerjaanya sedangkan pada Realisasi Triwulan III dan IV Tahun 2020 dimasukkan jumlah pekerjaanya. 	<ol style="list-style-type: none"> Dalam pembuatan laporan komposisi personil agar memperhatikan jumlah yang sebenarnya; Setelah laporan komposisi personil dibuat dan akan dilaporkan agar diteliti kembali keseragaman penulisan jumlah pegawai yang akan dilaporkan. 	<p>VP SDM & UMUM 31 Agustus 2021</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
	<p>c. Berdasarkan Jenis Pekerjaan pada Realisasi Triwulan III tahun 2020 dimasukkan jumlah pekerja Kontrak dan PKWT ($713 + 7 = 720$) sedangkan pada Realisasi Triwulan IV tahun 2020 hanya dimasukkan jumlah pekerja Kontrak saja (716).</p> <p>d. Penyampaian laporan jumlah PKWT pada Realisasi Triwulan I tahun 2021 ada perbedaan jumlah pegawai, yaitu : pada rekap pekerja tertulis 7 sedangkan pada PKWT tertulis 6.</p> <p>e. Ada selisih 1 jumlah pegawai pada Laporan Jumlah Personil Triwulan I Tahun 2021 yaitu (Realisasi Tahun 2020 Audited = 1082) sedangkan pada Triwulan IV tahun 2020 (Realisasi Triwulan IV 2020 = 1081).</p>			
8.	<p>Belum Adanya Personil Organik Yang Bertanggung Jawab Atas Peralatan IT dan Aplikasi Yang Berada di Cabang PT PTP</p> <p>Dari beberapa aplikasi yang sudah berjalan di seluruh cabang PT PTP, belum ada perkerja organik yang bertanggung jawab untuk peralatan IT dan aplikasi yang sudah di implementasikan di cabang-cabang PT PTP. Yang sudah berjalan saat ini hanya sebatas vendor.</p>	<p>Mengajukan usulan kepada Direktur Keuangan dan SDM terkait penempatan pekerja organik dalam bidang Sistem Informasi untuk di tempatkan di cabang-cabang PT PTP sebagai penanggung jawab peralatan IT yang terpasang baik hardware maupun software serta pemeliharaan aplikasi yang terinstal/beroperasi.</p>	<p>VP Sistem Informasi 31 Agustus 2021</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

10

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
9.	<p>RKM Divisi Pengembangan Usaha yang Outputnya Berpotensi Tidak Maksimal</p> <p>RKM pada Divisi Pengembangan Usaha sub Divis Analisa Pasar sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemetaan potensi pengembangan bisnis sesuai dengan kebutuhan pasar berdasarkan pelayanan jeis komoditi potensial, pemilik barang, <i>shipping line</i> dan <i>logistic provider</i> Kajian pengembangan <i>FSDBT (Floating Storage Dry Bulk Terminal)</i> dan atau <i>FSLBT (Floating Storage Liquid Bulk Terminal)</i> <p>Dari kedua RKM di atas, kendala /issue yang sama-sama terjadi adalah kesulitan dalam mencari konsultan yang kredibel yang sesuai dengan anggaran yang tersedia. Pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan/RKAP tahun 2021 dimana diputuskan anggaran konsultan Divisi Pengembangan Usaha sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan penetapan Anggaran Konsultan Divisi Pengembangan Usaha hanya ditetapkan sebesar RP. 150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah). Hasil wawancara dengan DVP Analisa Pasar, bahwa inisiasi penyusunan pengembangan <i>FSDBT</i> dan <i>FSLBT</i> adalah top-down planning yang merupakan pemetaan peluang usaha dari Direktur Komersial. Namun demikian Sub Divisi Analisa Pasar berencana mengganti konsultasi dengan menyewa/meng-Hire <i>individual expert</i> untuk melakukan kajian <i>Pre Feasibility study</i> dengan harapan hasil kajiannya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemetaan Potensi Pengembangan Pelayanan <i>Floating Storage</i> di Indonesia Kajian Kelayakan Bisnis Pengembangan Pelayanan <i>Floating Storage</i> dengan contoh rencana Kerjasama Pelayanan <i>Floating Storage</i> dengan PT Adhiguna Shipping Model Pembiayaan dan Pola Kemitraan Menyusun strategi dan tahapan pemasaran fasilitas <i>Floating Storage</i> kepada mitra. 	<ol style="list-style-type: none"> Mengadakan koordinasi dengan Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Divisi Keuangan pemecahan atas permasalahan yang ada terkait RKM Divisi Pengembangan Usaha. Mengajukan change request untuk merubah atau mengganti RKM Pengembangan Fasilitas <i>Floating Storage Dry Bulk Terminal (FSDBT)</i> dan <i>Floating Storage Liquid Bulk Terminal (FSLBT)</i> 	<p>VP Pengembangan Usaha</p> <p>31 Agustus 2021</p>	2

Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
1.	<p>Tagihan Pembayaran pekerjaan dari para mitra masih ada yang belum dibayarkan.</p> <p>Terdapat 42 jenis pekerjaan divisi Teknik dengan total tagihan sebesar Rp 5.675.489.723. Setelah konfirmasi dengan <i>customer service center</i> (CSC) sudah ada 27 jenis pekerjaan yang sudah dibayarkan. Tersisa 15 jenis pekerjaan yang belum dibayarkan senilai Rp 1.275.795.065.</p>	<p>Segera melaksanakan pembayaran terhadap tagihan dari para mitra setelah memenuhi syarat pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku</p>	<p>VP TTresury 31 Agustus 2021</p>	2
2.	<p>Penyusunan pedoman harga pokok penjualan (HPP) di 9 cabang</p> <p>RKM Penyusunan HPP sudah dicanangkan pada tahun 2020 dan sampai masa audit 2021 belum juga ditetapkan dan diganti dengan pola penyusunan pola komersialisasi diseluruh Cabang.</p>	<p>Mempercepat penyusunan penyusunan Pola Komersialisasi diseluruh Cabang untuk dijadikan pedoman/acuan tarif dan Negosiasi di semua cabang.</p>	<p>VP Komersial 31 Agustus 2021</p>	2
3.	<p>Penyesuaian Tarif OPP/OPT curah kering di Cabang Bengkulu</p> <p>Kesepakatan penyesuaian tarif OPP/OPT di Cabang Bengkulu sudah disepakati pada 25 Juli 2019, namun hingga kini belum dapat diimplementasikan karena kendala operasional khususnya Kinerja dan Peralatan.</p>	<p>Melakukan koordinasi intensif dengan IPC Cabang Bengkulu dan JPPI untuk dapat segera mengimplementasikan tarif kesepakatan OPP/OPT Curah Kering di Bengkulu.</p>	<p>VP Komersial 31 Agustus 2021</p>	2

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

12

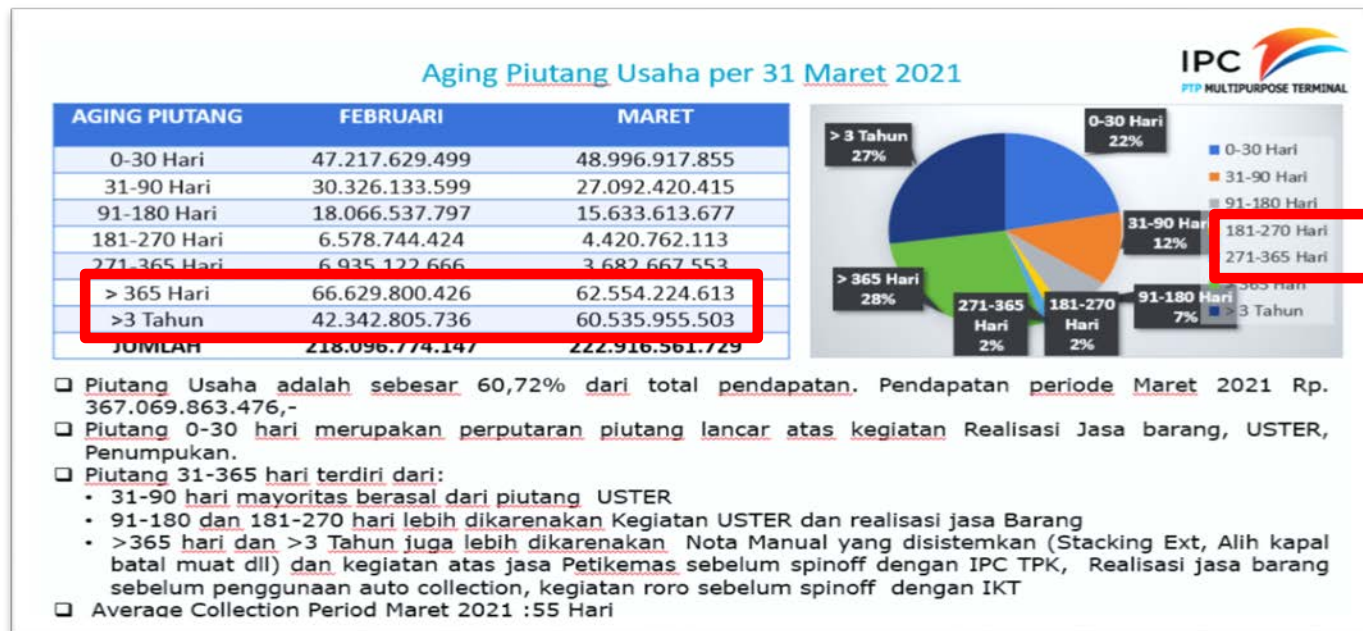
1. Penetapan Output yang Diharapkan dari RKM Divisi Treasury Kurang Tepat

Observasi

Berdasarkan observasi kami terhadap progress pelaksanaan RKM Strategis Corporate dan turunannya pada Divisi Treasury ditemui kondisi berikut:

- Direksi PT PTP telah menetapkan program “Penyelesaian Piutang Macet” sebagai salah satu RKM Strategis Corporate Tahun 2021 dengan output : **“Saldo Piutang diatas 2 tahun periode 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2020 turun 20% dan Average Collection Period (ACP) sebesar 48 hari.**
- Dalam daftar Aging Piutang Usaha per bulan, klasifikasi umur piutang yang dilaporkan adalah umur 0-30 hari (1 bln) , 31-90 hari (3 bln) , 91-180 hari (6 bln), 181-270 hari (9 bln) , 271-365 hari (1 th) , **> 365 hari (lebih dari 1 tahun)** dan **> 3 tahun** . **Tidak terdapat klasifikasi umur piutang diatas 2 tahun,** sebagaimana ditetapkan sebagai output RKM Strategis Corporate.
- Laporan Aging Piutang tersebut disampaikan secara rutin pada Radir bulanan.

Sebagai contoh disampaikan laporan aging piutang per 31 Maret 2021 :



Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

13

1. Penetapan Output yang Diharapkan dari RKM Divisi Treasury Kurang Tepat

Kriteria

- a. RKM Korporat dan turunannya adalah target kinerja yang harus dicapai oleh Direksi dan seluruh manajemen PTP
- b. Ketidakakuratan capaian progress RKM akan memberi gambaran yang *misleading* (menyesatkan) terhadap capaian target perusahaan

Root Cause

- a. Kurang tepatnya penetapan output yang diharapkan dari RKM Strategis Korporat
- b. Mekanisme cek dan ricek (kontrol pengendalian) yang belum optimal dalam penyusunan RKM

Implikasi terhadap bisnis:

- a. Progres RKM tidak dapat langsung diketahui pada saat pelaporan *aging* piutang
- b. Tidak efektifnya monitoring atas progress RKM
- c. Risiko disampaikannya data laporan progress RKM yang tidak akurat

Rekomendasi:

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

Prioritas

- a. Menambahkan klasifikasi umur piutang **“lebih dari 2 tahun”** pada Laporan Aging Piutang yang disampaikan pada Rapat Direksi bulanan atau mengubah output program Penyelesaian Piutang Macet agar sesuai dengan klasifikasi dalam Daftar Aging piutang
- b. Melaksanakan kontrol pengendalian yang lebih optimal dalam penerbitan laporan perusahaan

VP Treasury
31 Agustus 2021

1

Komentar Auditi:

Sudah membuat Nota Dinas ke VP Sistem Informasi Nomor KU.260/20/5/1/TSRY.PTP-21 perihal Penambahan Kelompok Aging 2-3 Tahun Untuk Output Report Daftar Aging.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

14

2. Belum tercapainya target Average Collection Period (ACP) sebesar 48 hari

Observasi

Realisasi KPI *Average Collection Period* (ACP) sampai dengan 31 Maret 2021 adalah sebesar rata-rata 55 hari, lebih lambat dari target sebesar rata-rata 48 hari. Belum tercapainya target ACP tersebut dikarenakan beberapa permasalahan terkait piutang sebagai berikut:

- Masih belum lunasnya sisa-sisa nota lama yakni nota-nota manual yang disistemkan atas beberapa kegiatan antara lain: *stacking extension* petikemas, alih kapal, batal muat, dll yang merupakan sisa kegiatan jasa petikemas sebelum *spinoff*, sebelum penggunaan system *autocollection* dan kegiatan RORO sebelum *spin off* dengan PT IKT dengan total nilai sebesar Rp 34,81 Milyar.
- Nota normal yang diterbitkan dari SIMKEU dan kemungkinan besar dapat tertagih sebesar Rp 27,01 Milyar
- Nota 'sampah' akibat kesalahan atau perlakuan pembukuan dengan total nilai Rp 28,33 Milyar
- Permasalahan karena faktur pajak (*autocollection*) yang belum diterima 18,191 milyar
- Saldo Piutang menurut *Neraca (Trial Balance)* adalah sebesar Rp 222,92 Milyar, dengan umur piutang di atas (lebih dari) 1 tahun adalah sebesar Rp 123,08 Milyar. Asumsi dibawah satu tahun adalah masih kategori lancar.
- Terdapat perbedaan antara saldo piutang menurut Neraca sebesar Rp 222,92 Milyar dengan saldo menurut Modul A/R (Rincian per Debitur) sebesar Rp 219,85 Milyar, sehingga selisihnya sebesar Rp 3,07 Milyar.

Rincian dari piutang-piutang tersebut serta kemungkinan penyelesaian atau penagihan dari piutang tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

PIUTANG TIDAK LANCAR

(dalam milyar rupiah)

NO	URAIAN	JML	KATEGORI	PENYELESAIAN		
				BESAR	SULIT	JML
1	Nota-nota Manual	34,81	Berkas lengkap	6,05	-	6,05
			Berkas tidak lengkap	-	28,76	28,76
2	Nota normal	27,01	Nota dari Simkeu	27,01		27,01
3	Nota 'Sampah'	28,33	Credit Memo (koreksi nota)	-	3,18	3,18
			<i>Double Line</i> (tercatat > satu kali)	-	0,26	0,26
			Nota Afiliasi (ICT)	-	24,89	24,89
4	Dampak Faktur Pajak	18,19	Faktur Pajak belum diterima	18,19	-	18,19
	Jumlah	108,34	Jumlah	51,25	57,09	108,34

Berdasarkan tabel tersebut, jika permasalahan piutang ini dapat diselesaikan, maka akan berdampak sebesar 108,34/123,08 atau 88,01 % pengurangan piutang tidak lancar.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

15

2. Belum tercapainya target Average Collection Period (ACP) sebesar 48 hari

Kriteria

- RKM Korporat Tahun 2021
- PSAK 71 tentang Pencadangan Penurunan Nilai Aset Keuangan
- Perdir Nomor HK.55/14/7/1/PTP-20 tanggal 7 Januari 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok

Root Cause

- Belum seragamnya penerapan UPER (sebagian tidak menerapkan UPER atau besaran UPER hanya 30%-80%) serta *Term of Payment* di cabang-cabang.
- Belum diterapkannya secara konsiten SLA kepada Mitra khususnya klausul penundaan pelayanan sebelum menyelesaikan kewajiban
- Belum dilaksanakannya penyelesaian atas Piutang Tidak Lancar (berumur lebih dari 1 tahun) baik dengan melakukan penghapusan untuk Piutang yang kemungkinan tertagihnya kecil serta penagihan kepada Debitur yang kemungkinan tertagihnya besar.

Implikasi terhadap bisnis:

- Bertambahnya saldo piutang tidak lancar/macet dan beban pencadangan penurunan nilai asset keuangan sebagaimana diamanatkan dalam PSAK 71
- Tidak tercapainya target kinerja/KPI Korporat

Rekomendasi:

- Mengajukan kepada Direksi aturan/ketentuan terkait penyeragaman penerapan dan besaran UPER serta *Term of Payment* di cabang-cabang.
- Menerapkan secara konsiten SLA kepada Mitra khususnya klausul penundaan pelayanan sebelum menyelesaikan kewajiban
- Melaksanakan penyelesaian atas Piutang Tidak Lancar baik dengan melakukan penghapusan untuk Piutang yang kemungkinan tertagihnya kecil serta penagihan kepada Debitur yang kemungkinan tertagihnya besar.

**PIC Temuan
Audit/Batas Waktu**

VP Treasury
31 Agustus 2021

Prioritas

1

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

16

2. Belum tercapainya target Average Collection Period (ACP) sebesar 48 hari

Komentar Auditi:

- a. Besaran UPER minimal sebesar total nilai perkiraan jasa kepelabuhanan. Hal tersebut diperkuat SK Direksi Holding E-Payment yang mengatur cara pembayaran yaitu : Advance Payment, Autocollection, dan Direct Payment. Untuk Term of Payment tidak dikenal dalam tata cara pembayaran, jika ada maka hal tersebut kreatifitas dari User
- b. Divisi Treasury tidak dapat menerapkan sanksi kepada Mitra yang masih mempunyai piutang dengan menunda pelayanan. Divisi Treasury sebatas menyampaikan posisi piutang terbuka dari para Mitra
- c. Telah ada SK Direksi Nomor HK.55/26/2/1/PTP-21 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Piutang Usaha PT Pelabuhan Tanjung Priok

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

3. Belum optimalnya upaya penurunan beban KSMU

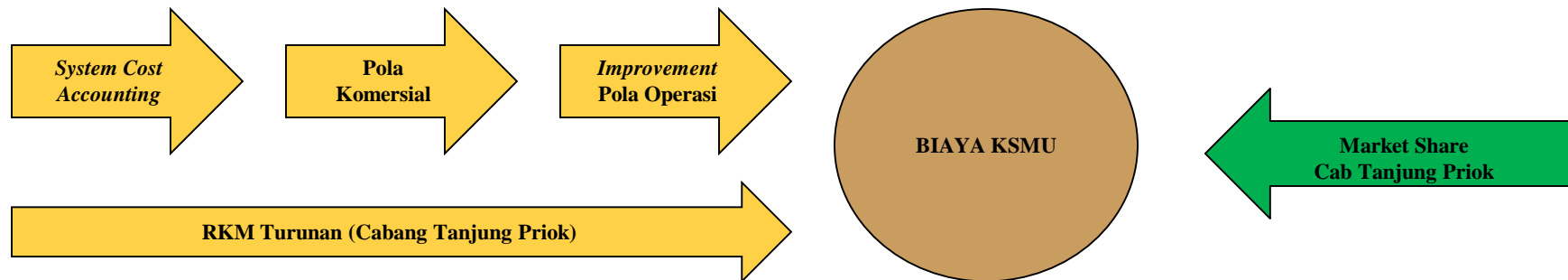
Observasi

Berdasarkan profile komponen biaya (*cost structure*) Triwulan I Tahun 2021, terlihat bahwa proporsi Biaya KSMU sebesar 48,14% adalah komponen biaya terbesar. Komponen Biaya KSMU tersebut lebih besar dua kali lipat dari komponen biaya terbesar kedua yakni Biaya Penyusutan dan Amortisasi sebesar 22,43% dan terkecil komponen Biaya Asuransi sebesar 0,42%.

Jika komposisi Biaya KSMU tersebut diuraikan lagi, maka komposisi terbesar adalah Biaya KSMU Terminal 51,93% diikuti Rental Fee : 43,49% dan terkecil Fasilitas Kendaraan : 0,94%. Biaya KSMU Terminal seluruhnya terjadi di Cabang Tanjung Priok.

Dalam upaya menurunkan komposisi Biaya KSMU, perusahaan telah melakukan berbagai upaya melalui RKM terkait, namun demikian progress dari RKM tersebut belum sesuai target yakni:

- Pembangunan *System Cost Accounting* baru tercapai 12% padahal target selesai adalah Desember 2021
- Belum selesainya *System Cost Accounting* berdampak pada RKM Penyusunan Pola Komersial sebab output yang ditetapkan adalah data tarif produk, *market share*, *clusterisasi/grading* terminal (dari sisi komersial) dengan realisasi 16,20%.
- Tertundanya pola komersial yang *firm* berpotensi akan menghambat program *improvement* pola operasi/*operation maturity level*,
- Rendahnya progress RKM diperparah oleh capaian turunan RKM ke Cabang Priok Triwulan I 2021, dimana 6 dari 10 RKM turunan di Cabang Priok masih 0% yang disebabkan oleh belum diterimanya (belum adanya) Project Charter Final. Dengan kondisi ini, Cabang Priok tidak optimal dalam memberikan support terhadap pencapaian RKM.
- Di sisi lain, penurunan Biaya KSMU sulit dicapai mengingat porsi *market share* Cabang Priok sampai Triwulan I 2021 hanya sebesar 2%, terkecil dibanding Cabang-cabang lain dan sangat jauh dibandingkan proporsi ideal *market share* yakni sebesar 60%-70%.



Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

18

3. Belum optimalnya upaya penurunan beban KSMU

Kriteria

- a. RKM Korporat Tahun 2021
- b. RKAP Tahun 2021

Root Cause

- a. Kendala implementasi *system cost accounting* baik dari internal maupun eksternal (koordinasi dengan IPC, dinamika perubahan CoA)
- b. Belum adanya turunan Project Charter Divisi-divisi (Operasi, Komersial dan Treaury) ke Cabang Tanjung Priok
- c. Belum optimalnya fungsi marketing di Divisi Komersial dan Cabang Tanjung Priok untuk meningkatkan pangsa pasar di Cabang Tanjung Priok

Implikasi terhadap bisnis:

- a. Potensi tidak tercapainya target RKM Korporat
- b. Terhambatnya Program Transformasi PT PTP

Rekomendasi:

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

Prioritas

- a. Mempercepat pembangunan *System Cost Accounting* dengan melakukan koordinasi yang optimal baik dengan pihak internal maupun dengan eksternal
- b. Membuat turunan Project Charter Divisi-divisi (Operasi, Komersial dan Treaury) ke Cabang Tanjung Priok
- c. Mengoptimalkan fungsi *marketing* di Divisi Komersial dan Cabang Tanjung Priok untuk meningkatkan pangsa pasar di Cabang Tanjung Priok

VP Keuangan
31 Agustus 2021

1

**VP Operasi,
VP Komersial,
VP Treasury**
31 Juli 2021

1

**VP Komersial
GM Tanjung Priok**
31 Desember 2021

2

Komentar Auditi:

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

4. Pentingnya SIA dan SIO dalam kegiatan operasional sesuai dengan pedoman K3.

Observasi

Dari penelitian dokumen dan wawancara dengan personil Divisi Teknik diperoleh data-data sebagai berikut :

Surat Izin Alat

Kondisi	Tanjung Priok	Banten	Jambi	Bengkulu	Panjang	Cirebon	Teluk Bayur	Palembang	Pangkal Balam	Tanjung Pandan	Jumlah
Valid	40	17	2	37	8	14	35	32	15	0	200
Proses	0	5	4	0	0	0	0	0	0	4	13
Expired	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tidak Digunakan	0	2	1	0	0	0	1	6	0	0	10
Jumlah											223

*Terdapat 15 alat yang dioperasikan oleh PT IPC TPK di wilayah Cabang Tanjung Priok.

Cabang	Jumlah Alat	SIA Expired	SIA Valid	Lokasi Alat
Tanjung Priok	15	11	4	Dermaga 009

Surat Izin Operator

Kondisi	Tanjung Priok	Banten	Jambi	Bengkulu	Panjang	Cirebon	Teluk Bayur	Palembang	Pangkal Balam	Tanjung Pandan	Jumlah
Valid	33	40	10	32	29	14	40	25	9	1	233
Proses	5	1	0	16	0	1	0	19	0	0	42
Expired	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Jumlah											276

Dari data-data tersebut diatas dapat ditarik simpulan bahwa masih terdapat SIA dan SIO yang masih belum selesai proses pengurusannya sehingga perlu segera diurus untuk mendukung kegiatan operasional dan penerapan K3 sesuai ketentuan yang berlaku.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

20

4. Pentingnya SIA dan SIO dalam kegiatan operasional sesuai dengan pedoman K3.

Kriteria

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkut.

Root Cause

- Masih terdapat beberapa Alat Bongkar Muat yang sedang dalam proses uji keur dan beberapa Operator yang masih dalam proses memperoleh SIO.
- Belum ada Berita Acara yang mengatur Hak dan Kewajiban terhadap alat alat mekanis Ex PT MTI yang diserahkan ke PT PTP dan dioperasikan oleh PT IPC TPK.

Implikasi terhadap bisnis:

- Berpotensi munculnya claim dari pihak pengguna jasa pelabuhan.
- Berpotensi terjadi permasalahan hukum apabila terjadi kecelakaan kerja.
- Alat di segel / dilarang beroperasi oleh pihak yang berwajib sehingga menurunkan pendapatan perusahaan.
- Buruknya citra perusahaan di mata umum / pengguna jasa Pelabuhan.

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ol style="list-style-type: none">Segera melaksanakan inventarisasi alat-alat di seluruh cabang cabang PT PTP.Segera mengurus Surat Ijin Alat (SIA) yang sudah expired di wilayah kerja PT PTP.Membuat surat kepada PT IPC TPK untuk melakukan pengurusan SIA terhadap alat-alat mekanis Ex PT MTI yang diserahkan ke PT PTP dan dioperasikan oleh PT IPC TPK.Segera mengurus SIO yang sudah berakhir masa berlakunya atau yang belum memiliki SIO.	VP Teknik , VP SDM & Keu 31 Agustus 2021	1

Komentar Auditi:

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

5. RKM Divisi Teknik yang belum terealisasi.

Observasi

Dari 20 (dua puluh) Program RKM Divisi Teknik masih terdapat 10 (sepuluh) program yang belum mendapatkan progress pekerjaan antara lain:

No	Rencana Program	PIC	Output Program	Mulai	Progress	Deskripsi Progress
1	Pengadaan 1 (Satu) Set Ramp Door di PTP Cabang Tanjung Priok	Teknik Mesin dan Listrik	BA serah terima pekerjaan dan Dokumentasi hasil pekerjaan	Jan 2021	0 %	Dalam tahap proses desain
2	Pengadaan 2 (Dua) Set Ramp Door di PTP Cabang Cirebon	Teknik Mesin dan Listrik	BA serah terima pekerjaan dan Dokumentasi hasil pekerjaan	Jan 2021	0 %	Sedang dalam tahap proses desain
3	Pengadaan Fasilitas Pendukung Supply CPO dan Asfalt di Dermaga PTP Cabang Cirebon	Teknik Mesin dan Listrik	BA serah terima pekerjaan dan Dokumentasi hasil pekerjaan	Jan 2021	0 %	Sedang dalam tahap proses desain
4	Pengadaan 1 (Satu) Set Ramp Door di PTP Cabang Pangkal Balam	Teknik Mesin dan Listrik	BA serah terima pekerjaan dan Dokumentasi hasil pekerjaan	Jan 2021	0 %	Sedang dalam tahap proses desain
5	Perbaikan Kantor dan Control Room PTP Cabang Panjang	Teknik Sipil	BA serah terima pekerjaan dan Dokumentasi hasil pekerjaan	Jan 2021	0 %	Sedang dalam tahap proses desain
6	Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan Fasilitas dan Utilitas Gedung Kantor Pusat PT Pelabuhan Tanjung Priok berikut SID, DED dan Supervisi	Teknik Sipil	Dokumen SID Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan Fasilitas dan Utilitas Gedung Kantor Pusat PT PTP	Jan 2021	0 %	Sedang proses pelaksanaan pekerjaan Desain Interior Kantor PTP di Gedung MMI
7	Pengadaan 1 (Satu) Set Fix Ramp Door di Dermaga 02 PTP Cabang Banten	Teknik Mesin dan Listrik	BA serah terima pekerjaan dan Pengadaan Ramp Door (belum 100%)	Jan 2021	0 %	Sedang dalam tahap proses desain
8	Pengembangan System Conveyor Belt dari Stockpile ke Loading Point Kebutuhan Bongkar Muat Batubara di PTP Cabang Bengkulu berikut SID, DED dan Supervisi	Teknik Mesin dan Listrik	BA serah terima dokumen SID	Jan 2021	0 %	Sedang dalam tahap proses desain
9	Pengembangan Fasilitas dan Utilitas PTP	Teknik Sipil	BA serah terima dokumen SID	Jan 2021	0 %	Sedang dalam tahap proses desain
10	Penataan Terminal di Cabang-Cabang PTP	Teknik Sipil	Penataan terminal (belum 100%)	Jan 2021	0 %	Sedang dalam tahap proses desain

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

22

5. RKM Divisi Teknik yang belum terealisasi.

Kriteria

Rencana Kerja Manajemen Divisi Teknik Tahun Anggaran 2021.

Root Cause

Menunggu proses persetujuan revisi RKAP investasi tahun 2021.

Implikasi terhadap bisnis:

- Waktu pelaksanaan RKM bisa tidak tercapai pada satu tahun berjalan.
- Tidak terserapnya anggaran investasi yang telah diajukan.
- Berpotensi Terjadinya pengerjaan program kerja yang tertunda di kerjakan dalam periode waktu yang sama.

Rekomendasi:

- Segera berkoordinasi dengan divisi terkait terutama bagian pengadaan.
- Mengajukan surat ke Direksi agar segera mendapat persetujuan revisi RKAP investasi tahun 2021.

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

VP Teknik
31 Agustus 2021

Prioritas

1

Komentar Auditi:

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

6. Belum Adanya Progres beberapa RKM Divisi SDM dan Umum

Observasi

Berdasarkan data yang di dapat pada Triwulan I tahun 2021 mengenai Rencana Kerja Manajemen (RKM) pada Divisi SDM dan Umum diketahui bahwa RKM pada Divisi SDM dan Umum ada 34 RKM, dari 34 RKM tersebut dapat dirinci dalam tabel di bawah ini :

JUMLAH RKM PER SUB. DIVISI PADA DIVISI SDM & UMUM

NO	SUB.DIVISI	TRIWULAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	SDM	11	2	3	-	16
2	ADM. UMUM & RT	14	2	-	-	16
3	PENGADAAN	2	-	-	-	2
JUMLAH		27	4	3	0	34

Telaah lebih lanjut dari data tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Dari 11 RKM (Triwulan I) pada Sub Divisi SDM, 6 RKM belum ada progresnya (masih 0%) padahal RKM tersebut tertulis dimulai pada bulan Januari 2021.
- Dari 2 RKM (Triwulan I) pada Sub Divisi Pengadaan, 1 RKM belum ada progresnya (masih 0%) padahal RKM tersebut tertulis dimulai pada bulan Januari 2021.

DAFTAR RKM DIVISI SDM & UMUM YANG BELUM ADA PROGRESNYA

NO.	RENCANA PROGRAM	PIC PROGRAM	TAHUN 2021		AKUMULASI PROGRES	KETERANGAN
			MULAI	AKHIR		
1	Man Power Planning	SDM	Jan 2021	Des 2021	0,0%	Non Strategis
2	Mengoptimalkan dan Mengaktifkan Aplikasi Knowledge Management	SDM	Jan 2021	Des 2021	0,0%	Non Strategis
3	Kajian P2B Berbasis Kinerja	SDM	Jan 2021	Des 2021	0,0%	Strategis
4	Penyesuaian Sistem HR : SPPD, Lembur dan Kehadiran Pekerja.	SDM	Jan 2021	Des 2021	0,0%	Non Strategis
5	Program Internalisasi Budaya	SDM	Jan 2021	Des 2021	0,0%	Non Strategis
6	Pemenuhan Kebutuhan SDM	SDM	Jan 2021	Des 2021	0,0%	Non Strategis
7	Penguatan Struktur dan Pemberdayaan Fungsi Pengadaan dengan Melaksanakan Sertifikasi Ahli Pengadaan.	Pengadaan	Jan 2021	Des 2021	0,0%	Non Strategis

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

24

6. Belum Adanya Progres beberapa RKM Divisi Sdm dan Umum

Kriteria

Rencana Kerja Manajemen Tahun 2021

Root Cause

Kurangnya pengawasan terhadap progress penyelesaian RKM.

Implikasi terhadap bisnis:

Potensi tidak tercapainya target RKM Korporat.

Rekomendasi:

Melakukan pengawasan terhadap progress pencapaian RKM.

**PIC Temuan
Audit/Batas Waktu**

VP SDM & UMUM
31 Agustus 2021

Prioritas

2

Komentar Auditi:

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

25

7. Laporan Komposisi Personil Belum Sesuai Kondisi Sebenarnya

Observasi

Berdasarkan data laporan komposisi personil yang telah dilaporkan ke PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) pada Triwulan I s/d IV tahun 2020 dan Triwulan I tahun 2021 ada laporan jumlah pegawai yang belum mencerminkan kondisi sebenarnya dan penempatan penulisan jumlah personil masih belum standar, hal ini dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini :

a. REKAPITULASI JUMLAH PEKERJA

NO	JENIS PEKERJA	REALISASI				
		TW-I/2020	TW-II/2020	TW-III/2020	TW-IV/2020	TW-I/2021
1	BOD (Pekerja IPC)	3	3	4	4	4
2	BOD (Non IPC)	1	1	-	-	-
3	Organik IPC	356	351	361	352	349
4	Organik PT PTP	3	3	3	3	3
	JUMLAH 1 - 4	363	358	368	359	356
5	Organik Pemegang Saham Lainnya	-	-	-	-	-
6	Non Organik/Kontrak	701	693	720	722	716
7	PKWT	-	-	-	-	7
	JUMLAH 1 - 7	1064	1051	1088	1081	1079

JUMLAH PEKERJA ORGANIK

NO	JENIS PEKERJA	REALISASI				
		TW-I/2020	TW-II/2020	TW-III/2020	TW-IV/2020	TW-I/2021
1	Menurut Pusat Pelayanan	363	361	368	359	356
2	Menurut Pendidikan	363	361	368	359	356
3	Menurut Usia	363	361	368	359	356
4	Menurut Kelas Jabatan	363	361	368	359	356
5	Menurut Golongan	363	361	368	359	356

Tabel diatas menunjukkan adanya perbedaan jumlah pegawai pada Realisasi Triwulan II/2020 yaitu pada Rekapitulasi Jumlah Pekerja tertulis 358 sedangkan pada Jumlah Pekerja Organik tertulis 361 (selisih 3 pegawai).

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

26

7. Laporan Komposisi Personil Belum Sesuai Kondisi Sebenarnya

Observasi

b. REKAPITULASI JUMLAH PEKERJA

NO	JENIS PEKERJA	REALISASI				
		TW-I/2020	TW-II/2020	TW-III/2020	TW-IV/2020	TW-I/2021
1	BOD (Pekerja IPC)	3	3	4	4	4
2	BOD (Non IPC)	1	1	-	-	-
3	Organik IPC	356	351	361	352	349
4	Organik PT PTP	3	3	3	3	3
	JUMLAH 1 - 4	363	358	368	359	356
5	Organik Pemegang Saham Lainnya	-	-	-	-	-
6	Non Organik/Kontrak	701	693	720	722	716
7	PKWT	-	-	-	-	7
	JUMLAH 1 - 7	1064	1051	1088	1081	1079

TENAGA KERJA ALIH DAYA

NO	JENIS PEKERJAAN	REALISASI				
		TW-I/2020	TW-II/2020	TW-III/2020	TW-IV/2020	TW-I/2021
1	Administrasi & Operasional	693	693	713	716	716
2	Security	243	243	266	259	102
3	Cleaning Service/OB	36	36	36	39	17
	JUMLAH 1 - 3	972	972	1015	1014	835

NO	TENAGA ALIH DAYA	REALISASI				
		TW-I/2020	TW-II/2020	TW-III/2020	TW-IV/2020	TW-I/2021
1	Berdasarkan Unit Kerja	693	693	713	716	716
2	Berdasarkan Pendidikan	693	693	713	716	716
3	Berdasarkan Masa Kerja	693	693	713	716	716
4	Berdasarkan Jenis Pekerjaan	-	-	720	716	-

PKWT

NO	PKWT	REALISASI				
		TW-I/2020	TW-II/2020	TW-III/2020	TW-IV/2020	TW-I/2021
1	Berdasarkan Jabatan/Posisi	8	8	7	6	6
2	Berdasarkan Pendidikan	8	8	7	6	6

Dari tabel data diatas dapat disampaikan :

- 1) Pada tabel Rekapitulasi Jumlah Pekerja No.6. Non Organik/Kontrak Penyampaian laporan jumlah personil Realisasi Triwulan II/2020 (693) seharusnya diseragamkan dengan penyampaian laporan jumlah personil Realisasi Triwulan I, III IV tahun 2020 dan Triwulan I tahun 2021 yaitu pada laporan Triwulan II tahun 2020 seharusnya dijumlahkan juga PKWT ($693 + 8 = 701$).

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

7. Laporan Komposisi Personil Belum Sesuai Kondisi Sebenarnya

Observasi

- 2) Penyampaian laporan jumlah personil Tenaga Alih Daya point 4. Berdasarkan Jenis Pekerjaan Realisasi Triwulan I, II Tahun 2020 dan Triwulan I tahun 2021 tidak memasukkan Jumlah pekerjaannya sedangkan pada Realisasi Triwulan III dan IV Tahun 2020 dimasukkan jumlah pekerjaannya.
- 3) Ada perbedaan cara perhitungan Penulisan jumlah pekerja pada point 4. Berdasarkan Jenis Pekerjaan pada Realisasi Triwulan III tahun 2020 dimasukkan jumlah pekerja Kontrak dan PKWT ($713 + 7 = 720$) sedangkan pada Realisasi Triwulan IV tahun 2020 hanya dimasukkan jumlah pekerja Kontrak saja (716).
- 4) Menyampaikan laporan jumlah PKWT pada Realisasi Triwulan I tahun 2021 ada perbedaan jumlah pegawai, yaitu : pada rekap pekerja tertulis 7 sedangkan pada PKWT tertulis 6.
- 5) Ada selisih 1 jumlah pegawai pada Laporan Jumlah Personil Triwulan I Tahun 2021 yaitu (Realisasi Tahun 2020 Audited =1082) sedangkan pada Triwulan IV tahun 2020 (Realisasi Triwulan IV 2020 = 1081).

Kriteria

- a. Perjanjian antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : OT.01.03/15/11/11/PSO/UT/PI.II-19 dan Nomor : HK.566/15/11/1/PTP-19 tanggal 15 November 2019 tentang Penugasan dan Pembinaan Pekerja PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang Ditugaskan pada PT Pelabuhan Tanjung Priok Pasal 11 LAPORAN PERIODIK.
- b. Data Kepegawaian

Root Cause

- a. Kurang cermat dalam pembuatan Laporan komposisi personil .
- b. Kurangnya pengawasan terhadap pembuatan Laporan.

Implikasi terhadap bisnis:

- a. Laporan Komposisi Personil masih belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan laporan menjadi kurang akurat.
- b. Image perusahaan yang kurang memperhatikan data kepegawaian

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

28

7. Laporan Komposisi Personil Belum Sesuai Kondisi Sebenarnya

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ul style="list-style-type: none">a. Dalam pembuatan laporan komposisi personil agar memperhatikan jumlah yang sebenarnya;b. Setelah laporan komposisi personil dibuat dan akan dilaporkan agar diteliti kembali keseragaman penulisan jumlah pegawai yang akan dilaporkan.	VP SDM & UMUM 31 Agustus 2021	2
Komentar Auditi:		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

29

8. Belum Adanya Personil Organik Yang Bertanggung Jawab Atas Peralatan IT dan Aplikasi Yang Berada di Cabang PT PTP

Observasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Div Sistem Informasi dari beberapa aplikasi yang sudah berjalan di seluruh cabang PT PTP, belum adanya pekerja organik yang ditugaskan/bertanggung jawab untuk peralatan IT dan aplikasi yang sudah di implementasikan di cabang-cabang PT PTP. Yang sudah berjalan saat ini hanya sebatas vendor yang memantau/mengawasi bilamana terjadi kendala pada sistem. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat sistem yang sudah beroperasi dicabang-cabang PT PTP.

DEMOGRAFI APLIKASI DI CABANG PT. PTP

No	Nama Aplikasi	KI Pusat	Priok	Banten	Cirebon	Panjang	Palembang	Bengkulu	Jambi	TI Bayur	Tj Pandan	Pki Balam
1	SIMOP Barang		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	SIMOP Rupa2		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	E-Office	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	P2B	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	ERP Finance	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	ERP HR	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	E-Report	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	NPK TOS		4	4	4	4	1	4	4	4	1	1
9	NPK SS						4					
10	e-Service		4									
11	e-Payment / Autocollection		4									
12	e-Invoice		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	NPK Billing			4		4			4	4	4	4
14	ITOS		4					4				
15	Lineos		4									
16	TPS Online		4	4								
17	Autogate TPS		4									
18	Autogate NPK			4								
19	SIMAKBI	4										
20	E-IRMA	4										
21	SIMTAX	4										
22	Fix Asset	4										
23	Dashboard PTP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	Sistem Helpdesk	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	Inventory Perangkat IT	4										

1 Not Installed yet
2 Development
3 Operated & Needs Improvement
4 Operated
5 Advanced

Kriteria

Mempertimbangkan jumlah aplikasi dan perangkat yang terdapat di cabang-cabang PT PTP, untuk cabang-cabang tertentu seperti cabang Tanjung Priok, Banten, dan Bengkulu seharusnya dapat ditempatkan pekerja organik di bidang Sistem Informasi.

Root Cause

Belum ada pengajuan dari Divisi Sistem Informasi ke Divisi SDM terkait penambahan/pemberdayaan personil (organik) di bidang Sistem Informasi untuk di tempatkan dicabang-cabang PT PTP.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

30

8. Belum Adanya Personil Organik Yang Bertanggung Jawab Atas Peralatan IT Dan Aplikasi Yang Berada di Cabang PT PTP

Implikasi Terhadap Bisnis

Dapat terganggunya pelayanan operasional di cabang-cabang bilamana terjadi kendala pada sistem terutama pada sistem yang sering digunakan pada kegiatan operasional.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Mengajukan usulan kepada Direktur Keuangan dan SDM terkait penempatan pekerja organik dalam bidang Sistem Informasi untuk di tempatkan di cabang-cabang PT PTP sebagai penanggung jawab peralatan IT yang terpasang baik hardware maupun software serta pemeliharaan aplikasi yang terinstal/beroperasi.	VP Sistem Informasi 31 Agustus 2021	2

Komentar Auditi:

9. RKM Divisi Pengembangan Usaha yang Outputnya Berpotensi Tidak Maksimal

Observasi

Berdasarkan observasi terhadap RKM pada Divisi Pengembangan Usaha sub Divisi Analisa Pasar sebagai berikut :

- a. Pemetaan potensi pengembangan bisnis sesuai dengan kebutuhan pasar berdasarkan pelayanan jenis komoditi potensial, pemilik barang, *shipping line* dan *logistic provider*
- b. Kajian pengembangan *FSDBT (Floating Storage Dry Bulk Terminal)* dan atau *FSLBT (Floating Storage Liquid Bulk Terminal)*

Dari kedua RKM di atas, kendala /issue yang sama-sama terjadi adalah kesulitan dalam mencari konsultan yang kredibel yang sesuai dengan anggaran yang tersedia. Pada saat penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan/RKAP tahun 2021 dimana diputuskan anggaran konsultan Divisi Pengembangan Usaha sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan penetapan Anggaran Konsultan Divisi Pengembangan Usaha hanya ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan merujuk pada Pedoman Standar Minimal Biaya Personil dan Non Personil yang dikeluarkan oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) untuk biaya Personil Tenaga Ahli berpengalaman untuk Provinsi DKI yang dibutuhkan dalam Kerangka acuan kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) JASA PENUNJUKAN KONSULTAN KAJIAN PENGEMBANGAN FASILITAS FLOATING STORAGE DRY BULK TERMINAL (FSDBT) DAN FLOATING STORAGE LIQUID BULK TERMINAL (FSLBT) adalah sebagai berikut :

- a. 1 orang Team Leader S2 dengan pengalaman 20 tahun sebesar : Rp. 75.900.000,- per bulan
- b. 1 orang Tenaga Ahli S2 dengan pengalaman 15 tahun sebesar : Rp. 66,450,000,- per bulan
- c. 1 orang Tenaga Ahli S2 dengan pengalaman 5 tahun sebesar : Rp. 47,450,000,- per bulan

Dengan demikian total biaya Tenaga ahli adalah sebesar Rp. 569.400.000,-

Biaya personil di atas belum termasuk biaya Personil Non Ahli (asisten ahli, tenaga administrasi dan lainnya), biaya-biaya peralatan dan biaya transportasi/perjalanan dinas untuk pekerjaan konsultasi selama 3 (tiga) bulan yang sangat tidak sebanding dengan anggaran biaya yang ditetapkan dalam RKAP.

Hasil wawancara dengan DVP Analisa Pasar, bahwa inisiasi penyusunan pengembangan FSDBT dan FSLBT adalah top-down planning yang merupakan pemetaan peluang usaha dari Direktur Komersial. Namun demikian Sub Divisi Analisa Pasar berencana mengganti konsultasi dengan menyewa/meng-*Hire individual expert* untuk melakukan kajian *Pre Feasibility study* dengan harapan hasil kajiannya sebagai berikut:

- a. Pemetaan Potensi Pengembangan Pelayanan *Floating Storage* di Indonesia
- b. Kajian Kelayakan Bisnis Pengembangan Pelayanan *Floating Storage* dengan contoh rencana Kerjasama Pelayanan *Floating Storage* dengan PT Adhiguna Shipping
- c. Model Pembiayaan dan Pola Kemitraan
- d. Menyusun strategi dan tahapan pemasaran fasilitas *Floating Storage* kepada mitra

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

32

9. RKM Divisi Pengembangan Usaha yang Outputnya Berpotensi Tidak Maksimal

Kriteria

- Laporan Trwiwulan I RKM Korporat PTP tahun 2021
- Pedoman Standar Minimal Remunerasi/Biaya Personil (Billing Rate) dan Biaya Langsung (Direct Cost) Untuk Badan Usaha Jasa Konsultansi Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Ikatan Nasional Konsultan Indonesia.

Root Cause

- Kurangnya anggaran biaya konsultasi
- Tidak adanya koordinasi antara Divisi Keuangan, Divisi Renstra dan Divisi Pengembangan Usaha dalam penetapan Anggaran yang berkaitan dengan RKM

Implikasi terhadap bisnis:

- Progres RKM (khususnya Kajian FSDBT dan FSLBT) tidak dapat dilanjutkan
- Apabila Konsultansi Kajian FSDBT dan FSLBT tetap dilaksanakan, Hasilnya berpotensi tidak optimal
- Penggunaan anggaran biaya yang tidak optimal

Rekomendasi:

- Mengadakan koordinasi dengan Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan dan Divisi Keuangan pemecahan atas permasalahan yang ada terkait RKM Divisi Pengembangan Usaha.
- Mengajukan change request untuk merubah atau mengganti RKM Pengembangan Fasilitas Floating Storage Dry Bulk Terminal (FSDBT) dan Floating Storage Liquid Bulk Terminal (FSLBT)

**PIC Temuan
Audit/Batas Waktu**

Prioritas

**VP Pengembangan
Usaha**
31 Agustus 2021

2

Komentar Auditi:

Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Observasi

Dari hasil audit umum di PTP Multipurpose Terminal Cabang Tanjung Priok, kami temukan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan layanan, kepuasan pelanggan dan karyawan serta peningkatan kinerja cabang sebagai berikut:

1. Tagihan Pembayaran pekerjaan dari para mitra masih ada yang belum dibayarkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Divisi Teknik dari 42 jenis pekerjaan dengan total tagihan dari mitra sebesar Rp 5.675.489.723. Setelah dicroscek /konfirmasi dengan *customer service center* (CSC) sudah terdapat 27 jenis pekerjaan yang sudah dibayarkan. Masih tersisa 15 jenis pekerjaan yang belum dibayarkan senilai Rp 1.275.795.065.

2. Penyusunan pedoman harga pokok penjualan (HPP) di 9 cabang

RKM Penyusunan HPP sudah dicanangkan pada tahun 2020 dan sampai masa audit 2021 belum juga ditetapkan dan diganti dengan pola penyusunan pola komersialisasi diseluruh Cabang.

3. Penyesuaian Tarif OPP/OPT curah kering di Cabang Bengkulu

Kesepakatan penyesuaian tarif OPP/OPT di Cabang Bengkulu sudah disepakati pada 25 Juli 2019, namun hingga kini belum dapat diimplementasikan karena kendala operasional khususnya Kinerja dan Peralatan.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
1. Segera melaksanakan pembayaran terhadap tagihan dari para mitra setelah memenuhi syarat pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.	VP Treasury 31 Agustus 2021	2
2. Mempercepat penyusunan Pola Komersialisasi diseluruh Cabang untuk dijadikan pedoman/acuan tarif dan Negosiasi di semua cabang.	VP Komersial 31 Agustus 2021	2
3. Melakukan koordinasi intensif dengan IPC Cabang Bengkulu dan PT JPPI untuk dapat segera mengimplementasikan tarif kesepakatan OPP/OPT Curah Kering di Bengkulu.	VP Komersial 31 Agustus 2021	2


Lampiran 3: Definisi Istilah

Opini Audit	Deskripsi
1 – Adequate	Kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
2 – Some Improvement Needed	Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
3 – Major Improvement Needed	Terdapat banyak kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Kontrol yang ada kemungkinan tidak dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
4 – Inadequate	Kontrol yang ada tidak cukup, sesuai, atau efektif dan tidak memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Prioritas	Deskripsi
1	Perbaikan perlu dilakukan segera/dalam jangka waktu singkat untuk menghindari terganggunya operasi perusahaan.
2	Perbaikan perlu dilakukan dalam tiga bulan karena berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.
3	Perbaikan dapat dilakukan dalam enam bulan. Tidak berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.

Lampiran 3: Surat Perintah Audit (Copy)

35


PTP MULTIPURPOSE TERMINAL

SURAT PERINTAH
Nomor: PR-02/7/4/1/PTP-21

1. Dasar : a. Pelaksanaan program pembenahan kelembagaan secara internal agar dapat memberikan layanan prima, meningkatkan citra perusahaan dan memberi nilai tambah bagi stakeholder;
b. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Divisi SPI Tahun 2021;
c. Untuk Kepentingan Dinas.



2. Diperintahkan kepada : a. E. Setyo Budi Nugroho (Pengawas)
b. Agus Widjanarko (Ketua Tim)
c. Joko Purwanto (Anggota)
d. Solihin (Anggota)
e. M. Reza Hazzirin (Anggota)

3. Isi perintah : a. Agar melaksanakan Audit Umum di PT PTP Kantor Pusat
b. Pelaksanaan kegiatan tersebut selama 25 (dua puluh lima) hari kerja dimulai sejak tanggal 12 April s.d. 19 Mei 2021;
c. Melaporkan hasil Audit kepada Direktur Utama;
d. Agar melaksanakan perintah ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

4. Perintah Selesai.





Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 April 2021

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR UTAMA,



DRAJAT SULISTYO

Terbacaan Yth.
- Para Direksi
- Para SVP / VP Anak Perusahaan PTP

PT Pelabuhan Tanjung Priok
Jl. Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok
Jakarta 14310, Indonesia
P. +62 21 4301080
F. +62 21 4372947
E. ptpmultipurpose@ptp.co.id
W. www.ptp.co.id

ptp Multipurpose | @ptpmultipurpose | @ptpmultipurpose | PT Pelabuhan Tanjung Priok